

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM TATA KELOLA LALU LINTAS DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR

Dedy Hartono¹, Aprilia Lestari², Eva Susanti³, Yahnu Wiguno Sanyoto⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja¹

Dosen Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja^{2,3,4}

Email: dedyhartono298@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>The increase in the number of motor vehicles that is not proportional to road capacity has caused traffic problems in Baturaja Timur District, Ogan Komering Ulu Regency. Traffic congestion mainly occurs during peak hours due to commercial, educational, and office activities. This study aims to analyze the strategy of the Ogan Komering Ulu Regency Transportation Agency in traffic governance based on good governance principles. The research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results indicate that traffic governance strategies have been implemented through traffic management and engineering, field supervision, and the provision of supporting facilities. However, their implementation still faces constraints related to resource limitations, community participation, and policy sustainability.</i>
Nomor : 1	
Bulan : Januari	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Keyword: <i>traffic governance, strategy, Transportation Agency, Baturaja Timur</i>	

Abstrak

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan permasalahan lalu lintas di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepadatan lalu lintas terutama terjadi pada jam sibuk akibat aktivitas perdagangan, pendidikan, dan perkantoran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tata kelola lalu lintas berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tata kelola lalu lintas telah dilaksanakan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan lapangan, serta penyediaan sarana pendukung. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan.

Kata Kunci: *tata kelola lalu lintas, strategi, Dinas Perhubungan, Baturaja Timur.*

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas pembangunan daerah. Kecamatan Baturaja Timur sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan kepadatan lalu lintas temporer, parkir liar, serta penurunan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan strategi tata kelola lalu lintas yang efektif oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang berwenang.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi dalam organisasi publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan terencana untuk mencapai tujuan pelayanan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja organisasi publik.

Tata kelola lalu lintas merupakan proses pengelolaan lalu lintas yang melibatkan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Manajemen lalu lintas menjadi instrumen operasional dari tata kelola lalu lintas yang mencakup rekayasa lalu lintas, pengaturan arus kendaraan, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat.

Prinsip tata kelola lalu lintas meliputi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator dalam menilai keberhasilan strategi pengelolaan lalu lintas di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan, masyarakat, dan akademisi, serta melalui observasi lapangan dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus evaluasi menggunakan Prinsip tata Kelola lalu lintas dikaitkan dengan teori Oglesby & Hicks dengan empat strategi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tata kelola lalu lintas di Kecamatan Baturaja Timur dianalisis berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan

yang dikaitkan dengan empat sub bidang utama, yaitu rekayasa lalu lintas, pengawasan kebijakan, fasilitas penunjang, serta edukasi dan penegakan hukum.

1. Efektivitas

Prinsip efektivitas tercermin dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas melalui pengaturan arus kendaraan, penataan simpang, dan pengendalian parkir di badan jalan yang mampu meningkatkan kelancaran lalu lintas pada jam sibuk. Pada sub bidang pengawasan kebijakan, efektivitas terlihat dari penempatan petugas di titik rawan kepadatan. Sementara itu, fasilitas penunjang seperti rambu dan marka jalan membantu memperjelas pergerakan kendaraan, dan edukasi serta penegakan hukum meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Namun, efektivitas masih sangat bergantung pada intensitas pengawasan di lapangan.

2. Efisiensi

Prinsip efisiensi ditunjukkan melalui optimalisasi rekayasa lalu lintas tanpa pembangunan infrastruktur baru, sehingga penggunaan anggaran lebih hemat. Pengawasan kebijakan dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia, meskipun jumlah personel terbatas. Penyediaan fasilitas penunjang dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, sedangkan edukasi dan penegakan hukum menjadi upaya efisien dalam menekan pelanggaran tanpa biaya fisik yang besar. Keterbatasan sarana dan personel masih menjadi kendala efisiensi secara menyeluruh.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas tercermin dari kejelasan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan rekayasa lalu lintas dan pengawasan kebijakan sesuai program kerja yang ditetapkan. Penyediaan fasilitas penunjang dan pelaksanaan edukasi serta penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, akuntabilitas publik masih perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi terkait hasil evaluasi kebijakan lalu lintas kepada masyarakat.

4. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi terlihat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan dan penegakan hukum yang melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pemerintah kecamatan. Koordinasi ini mendukung efektivitas rekayasa lalu lintas di lapangan serta pemeliharaan fasilitas penunjang. Meskipun demikian, koordinasi masih bersifat operasional dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terutama terlihat pada sub bidang edukasi dan penegakan hukum, di mana masyarakat diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Namun, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas penunjang dan mendukung keberhasilan rekayasa lalu lintas masih relatif rendah, sehingga memerlukan peningkatan sosialisasi dan kesadaran kolektif.

6. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam tata kelola lalu lintas masih menjadi tantangan. Strategi rekayasa lalu lintas dan pengawasan kebijakan cenderung bersifat jangka pendek untuk mengatasi kepadatan temporer. Upaya keberlanjutan melalui pemeliharaan fasilitas penunjang serta edukasi berkelanjutan dan penegakan hukum belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan jangka panjang, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih strategis dan berkesinambungan.

D. KESIMPULAN

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tata kelola lalu lintas di Kecamatan Baturaja Timur telah dilaksanakan melalui rekayasa lalu lintas, pengawasan kebijakan, penyediaan fasilitas penunjang, serta edukasi dan penegakan hukum. Strategi tersebut cukup efektif dan efisien dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas, namun masih memerlukan penguatan pada aspek akuntabilitas, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan.

Saran Dinas Perhubungan perlu memperkuat perencanaan jangka panjang, meningkatkan koordinasi lintas instansi, serta mengoptimalkan edukasi dan pengawasan agar tata kelola lalu lintas dapat berjalan secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2014). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. Boston: Pearson Education.
- Hobbs, F. D. (1995). Traffic Planning and Engineering. Oxford: Pergamon Press.
- Morlok, E. K. (1991). Introduction to Transportation Engineering and Planning. New York: McGraw-Hill.
- Oglesby, C. H., & Hicks, R. G. (1990). Highway Engineering. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2004). *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu. (2024). *Data Lalu Lintas dan Transportasi Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Baturaja.